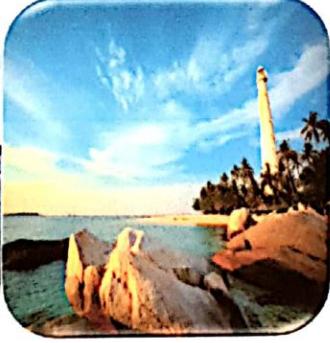




DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang, mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang diatasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



ARIF TOHA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670320 199203 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : ARIF TOHA
Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : R. AGUS H. PURNOMO
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2019

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


R. AGUS H. PURNOMO

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


ARIF TOHA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670320 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		Satuan	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Costumer Perspectives</i>					
SS.1	Terselenggaranya administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.1	Persentase peningkatan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bersertifikat	%	90
		IKU.2	Persentase kehandalan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
		IKU.3	Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (<i>skala likert</i> 1-5).	Nilai	4
		IKU.4	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	97
		IKU.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
<i>Internal Business Process Perspective</i>					
SS.2	Terlaksananya perencanaan, pemograman, penganggaran, monev dan pentarifan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.6	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Dokumen	5
		IKU.7	Jumlah pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi terkait SAKIP dan dokumen lainnya	Kegiatan	50
		IKU.8	Jumlah studi dan kajian yang disusun	Dokumen	2
SS.3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akuntabel	IKU.9	Jumlah dokumen dan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disusun	Dokumen	302
		IKU.10	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi di bidang keuangan	Kegiatan	6
		IKU.11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan	Kegiatan	10
SS.4	Terlaksananya fungsi kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.12	Jumlah penyelenggaraan diklat dan bimtek terkait peningkatan kompetensi	Kegiatan	8
		IKU.13	Jumlah penerbitan SK mutasi/ kenaikan pangkat/ jabatan fungsional	SK	4142
		IKU.14	Persentase jumlah kasus disiplin pegawai yang dapat ditangani sampai selesai	%	100
SS.5	Meningkatnya pemenuhan dan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang transportasi laut	IKU.15	Jumlah rancangan dan peraturan perundangan yang ditetapkan	Dokumen	20
		IKU.16	Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Dokumen	8
		IKU.17	Jumlah penyelesaian perkara	Dokumen	5
SS.6	Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional	IKU.18	Jumlah perjanjian kerjasama dalam negeri	Dokumen	6
		IKU.19	Jumlah perjanjian kerjasama bilateral, regional dan multilateral	Dokumen	2
		IKU.20	Jumlah penyelenggaraan pertemuan dalam rangka kerjasama nasional dan internasional	Kegiatan	18
SS.7	Terlaksananya pembinaan administrasi perkantoran, keruماhtanggaan, dan penatausahaan	IKU.21	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran	%	100
		IKU.22	Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional keruماhtanggaan	%	100
		IKU.23	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	54.178.537.670.155
SS.8	Meningkatnya kinerja kehumasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.24	Jumlah kegiatan pelayanan informasi bagi masyarakat	Kegiatan	5
		IKU.25	Jumlah kegiatan kehumasan dan protokoler	Kegiatan	14
SS. 9	Meningkatnya kinerja pengelolaan sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.26	Jumlah kegiatan pembangunan/pengembangan Pemeliharaan informasi yang berbasis teknologi informasi (IT)	Kegiatan	2
SS. 10	Terlaksananya fungsi manajemen Organisasi dan Tata Laksana	IKU.27	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi	Kegiatan	4
		IKU.28	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun	Kegiatan	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		Satuan	Target 2019
<i>Learn and Growth Perspective</i>					
SS.11	Tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional	IKU.29	Jumlah SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti diklat/bimtek	Orang	30
SS.12	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.30	Jumlah sistem dan informasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Unit	1
		IKU.31	Persepsi publik terkait pelayanan informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (1-10)	Nilai	9
SS.13	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKU.32	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	5
SS.14	Terkelolanya anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara Optimal	IKU.33	Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.34	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	90
		IKU.35	Nilai BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	17.474.651.000
		IKU.36	Target PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp	56.160.761.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
(empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

432.667.241.000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

Jakarta,
2019
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670320 199203 1 003